



KEAMANAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN KRITIS TERKAIT PERANG INTRA-NEGARA

Rizal A.Hidayat

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Al Azhar Indonesia;
e-mail: rizalhidayat369@yahoo.co.id

Abstract

This article tries to propose the human security issue that explained by critical security studies approach as an ontological and epistemological critique to state security as the object referent. The critique comes from the wider development of the Copenhagen School promoted by Buzan, Weaver and de Wilde (1998) through the security sector analysis and securitization concepts. Both of those are responded by the critical security studies approach from Aberystwyth/Wales School and the Toronto School which is proposing the three questions of ontological claims through the true and real security concept. This three ontological claims are: what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?. By the deepening relevance to intra-state conflict, the claim of security concepts find the momentum that the threat of security of intra-state conflict/war can arise in all aspects of human life and then following the true and real security threat to the security of human life as a whole.

Keywords: *Aberystwyth/Wales School, Copenhagen School, human security, intra-state war, Toronto School.*

Abstrak

Tulisan ini didasari dari persoalan keamanan manusia yang dikaji melalui pendekatan studi keamanan kritis sebagai sebuah kritik ontologis dan epistemologis mengenai negara sebagai obyek referen keamanan. Kritik tersebut bermuara dari pengembangan lebih luas dari pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan de Wilde (1998) melalui analisis sektor keamanan dan konsep sekuritisasi. Kedua hal inilah yang kemudian ditanggapi oleh kelompok pendekatan Studi Keamanan Kritis dalam *Aberystwyth/Wales School* dan *Toronto School* yang mengajukan tiga klaim pertanyaan ontologis seputar konsep keamanan yang sebenarnya dan nyata. Ketiga klaim tersebut mencakup: *what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?*. Melalui relevansinya dalam konflik/perang *intra-state*, maka klaim akan konsep keamanan menemukan momentumnya bahwa ancaman keamanan dalam konflik/perang *intra-state*, bisa muncul terhadap segala aspek kehidupan manusia dan kemudian melahirkan ancaman keamanan yang sebenarnya dan nyata terhadap keamanan kehidupan manusia seutuhnya.

Kata Kunci: *Aberystwyth/Wales School, Copenhagen School, keamanan manusia, perang intra-state, Toronto School.*

Pendahuluan

Perkembangan konflik bersenjata atau lazim disebut sebagai peperangan, membawa berbagai pemikiran baru yang dikaitkan dengan pendekatan Studi Keamanan. Pemikiran baru ini sejalan dengan berbagai karakteristik peperangan yang membawa tipologi generasi perang semenjak Perang Dunia Pertama sampai pada generasi keempat dan kelima atau *hybrid warfare*. Dalam hal ini, tinjauan awal pendekatan Studi Keamanan pasca Perang Dingin yang masih berorientasi pada negara sebagai obyek referen keamanan, dijelaskan pertama kali oleh pendekatan dari *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan de Wilde (1998). Dari pendekatan inilah, maka terjadi diversifikasi obyek kajian keamanan tradisional (militer) dan keamanan non-tradisional (nirmiliter).

Melalui pendekatan *Copenhagen School*, pengembangan lebih luas dari konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan de Wilde (1998: 21) terkait dengan analisis sektoral keamanan (*sectoral analysis security*) dan konsep sekuritisasi (*concept of securitization*). Namun keduanya tetap menitikberatkan pada negara sebagai penanggung jawab ancaman keamanan militer dan nirmiliter. Hal tersebut tercermin dari pernyataan mendasar ketiganya dalam rangka menjawab persoalan ontologis seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan ini dimanifestasikan ke dalam bentuk ancaman eksistensial (*existential threat*) dan tindakan darurat (*emergency measures*). Kedua entitas konsep keamanan yang diajukan oleh Buzan, Waever dan de Wilde sebagai karakteristik *Copenhagen School* yang terdiri atas keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Sekuritisasi diartikan lebih dari sekedar politisasi keamanan (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 22).

Menurut Buzan, Waever dan de Wilde (1998: 23-24) secara teori, setiap isu yang berkembang di ruang publik dapat ditempatkan dalam spektrum non politisasi. Artinya tidak terkait dengan keamanan negara dan dengan demikian tidak memerlukan debat publik dan kebijakan publik. menjadi terpolitisasi ketika memasuki ruang debat publik yang membutuhkan keputusan negara/pemerintah dan pengalokasian sumber daya pemerintah dalam menyelesaikan isu keamanan tersebut. Bisa juga meskipun sangat jarang, membutuhkan keterlibatan sekelompok individu yang mewakili negara/pemerintah sehingga memunculkan isu sekuriti yang diartikan sebagai isu keamanan yang mewakili suatu ancaman eksistensial, membutuhkan tindakan

emergensi dan menjustifikasikan segala tindakan dan keputusan di luar jangkauan prosedur normal dan proses politik formal.

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari esensi *Copenhagen School* adalah bahwa sebenarnya keamanan manusia masih menjadi subordinat obyek referen keamanan negara. Dalam artian yang sama, negara merupakan subyek politik dari penanggung jawab utama ancaman keamanan manusia di dalam negara tersebut. Hal demikian terjadi karena *Copenhagen School* menggarisbawahi secara tegas pelibatan unit analisis terhadap Studi Keamanan yang meliputi tiga tipe unit (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998: 35):

1. *Referent Object*: sesuatu yang dilihat sebagai obyek yang terancam dan memiliki klaim legitimasi untuk tetap *survive*. Yang dimaksud obyek yang terancam keamanannya dalam hal ini adalah negara. (*The referent object for security has traditionally been the state and, in a more hidden way, the nation. For a state, survival is about sovereignty, and for a nation it is about identity*)
2. *Securitizing Actors*: merupakan aktor yang mendeklarasikan segala obyek yang terancam keamanannya. Dalam hal ini aktor tersebut mampu mengonstruksi segala sesuatu yang merupakan ancaman bagi keamanan negara. (*In principle, securitizing actors can attempt to construct anything as a referent object*)
3. *Functional Actors*: setiap aktor yang mempengaruhi dinamika suatu sektor keamanan, namun bukan merupakan aktor yang menjadi obyek referen keamanan, dan merupakan aktor yang berkepentingan terhadap obyek referen keamanan (negara).

Oleh karena itu, ancaman keamanan terhadap manusia menjadi begitu signifikan untuk menjadi obyek kajian Studi Keamanan yang bebas dari dikotomi keamanan negara melalui ranah keamanan tradisional (militer) dan non-tradisional (non-militer). Dengan demikian faktor kebebasan manusia dari berbagai macam ancaman dan tekanan, baik yang bersifat militer maupun non-militer merupakan bentuk pergeseran obyek Studi Keamanan yang merefleksikan pergeseran konflik bersenjata dewasa ini.

Ancaman Keamanan Manusia

Ancaman terhadap kerusakan eksistensi keamanan manusia menjadi terbuka lebar apabila mengacu pada *United Nation's Millenium Declaration and the Millenium*

Development Goals (MDGs). Dalam rangka menjamin keamanan manusia dalam kerangka MDGs ini, maka tujuan yang ingin dibangun dan dicapai adalah (www.unocha.org, 2014: 2-3):

1. Melindungi manusia dari konflik kejahatan
2. Melindungi dan memberdayakan manusia/penduduk terkait migrasi akibat konflik/perang atau kejahatan hak asasi manusia
3. Melindungi dan memberdayakan manusia terkait situasi pasca konflik.
4. Ketidakamanan ekonomi – terkait dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
5. Menjamin kesehatan untuk keamanan manusia – penyebaran penyakit dan ancaman kemiskinan sebagai dampak dari konflik ; dan
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai untuk keamanan manusia: menyediakan sarana pendidikan dasar dan informasi publik terkait ketiga hal tersebut yang relevan dengan bentuk-bentuk kejahatan akibat konflik.

Pergeseran fokus kajian keamanan tradisional menjadi non-tradisional sebenarnya menransformasikan perang baru terhadap setiap aktor yang mengancam eksistensi keamanan manusia. Perhatian terhadap keamanan manusia menjadi sebuah bentuk perhatian akan pentingnya keamanan global yang digeneralisasi oleh enam *output* keamanan manusia menurut *United Nations Development Program* (UNDP) di atas. Perang baru atau perang masa depan akan lebih banyak dipicu oleh keenam tujuan keamanan manusia.

Terkait dengan deskripsi tersebut, manusia rentan terhadap dampak perang baru (*new wars*), sehingga para aktor yang terlibat dalam perang baru tersebut jangkauan perannya melebihi negara, yang tidak dipengaruhi oleh segala aturan perang lama (*old wars*), dan tidak dapat dimenangkan oleh perang lama (Hirst, 2004: 115).

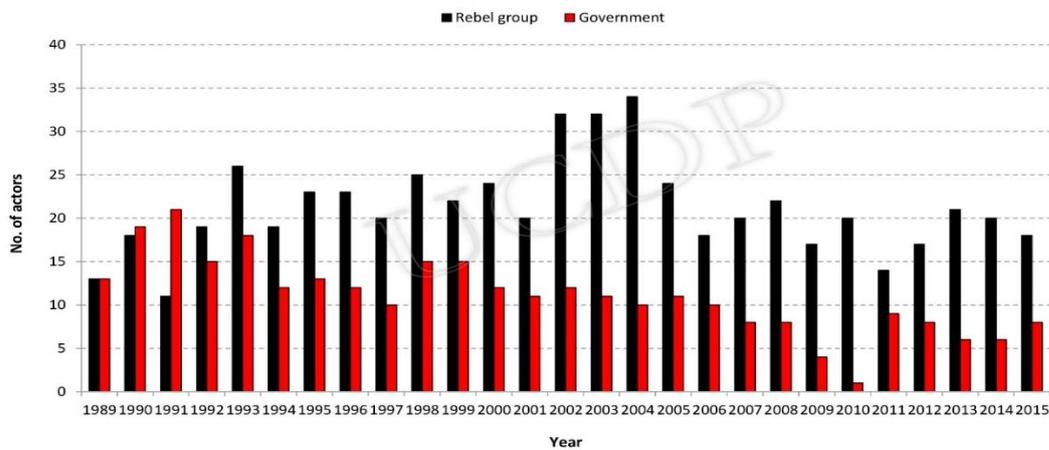
Pemikiran tersebut di didasarkan pada penekanan perbedaan karakteristik mendasar fenomena perang terjadi pasca perang dingin berakhir. Namun juga tetap bertitik tolak dari manifestasi dua perang dunia sebelumnya. Perang lama merupakan perang antar negara. Perang yang terjadi melalui pertempuran antar angkatan bersejata (militer), dan perang yang ditentukan oleh pertemuan antar pasukan militer yang jelas berbeda dengan warga sipil. Tidak ada perang yang terjadi sama sekali dengan model

perang tersebut, yang tentu saja model perang tersebut diambil dari perang abad ke-20 dan imajinasi perang yang terjadi pada masa Perang Dingin. Suatu perang baru diperjuangkan oleh kombinasi aktor negara dan non-negara, dan biasanya berjuang bukan karena alasan negara atau ideologis, tapi untuk identitas. Pertempuran jarang terjadi, namun kekerasan dari perang tersebut paling banyak diarahkan terhadap warga sipil. Hal inilah yang begitu penting untuk dipahami dalam perang baru. (*www.dissentmagazine.org*, 2007: 16).

Persoalan yang kemudian muncul adalah: apakah keamanan manusia merupakan hasil pergeseran nyata dari ancaman keamanan yang tetap bermuara pada karakteristik keamanan militer selama ini? Atau pertanyaan yang lebih krusial adalah: apakah persoalan di atas mensintesis keamanan manusia sebagai sebuah pendekatan konsep keamanan yang menampung berbagai fenomena ancaman terhadap segala hal yang dirasakan mengancam eksistensi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia sebagai hasil dinamika interaksi antar aktor dalam politik internasional maupun global? Dimana yang terakhir ini cenderung menghasilkan berbagai kekerasan sistemik yang mengancam kelangsungan komunitas manusia dalam suatu rezim pemerintahan yang demokratis sekalipun.

Pada akhirnya semua pertanyaan tersebut tidak pernah memberikan *positioning* jawaban ontologis sejalan dengan dinamika pergeseran ragam isu keamanan itu sendiri. Artinya, ditinjau sebagai sebuah konsep keamanan, maka keamanan manusia menghasilkan ragam interpretasi yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang kepentingan *power and order* itu sendiri. Baik kepentingan tersebut dijalankan oleh aktor negara maupun institusi non-negara, bahkan oleh individu sekalipun. Dalam artian, maka keamanan manusia sebagai hasil pergeseran isu keamanan pasca perang dingin saat ini didominasi oleh aktor non-negara.

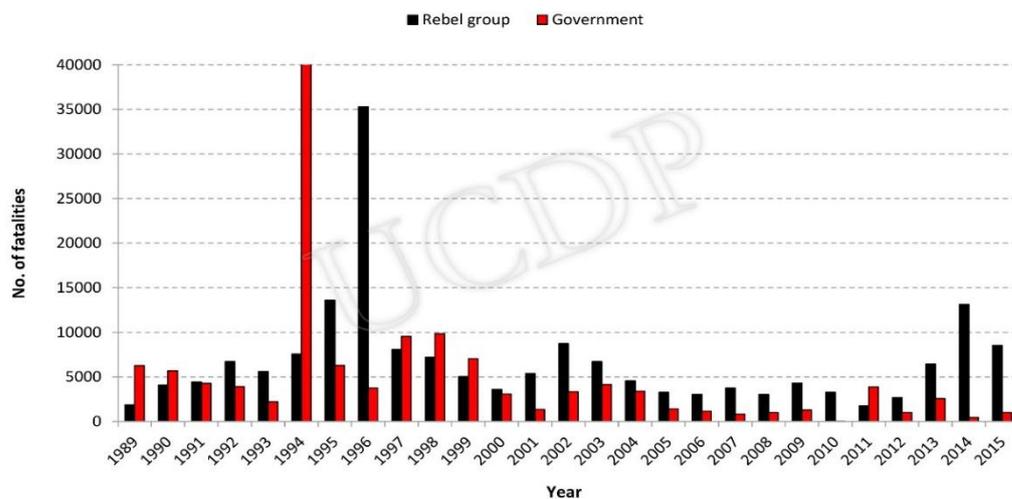
Gambar 1 Type of One-sided Actor
 Type of One-sided Actor, 1989-2015



Sumber: Upsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se, 2016

Gambar 1 mencoba merelevansikan ancaman keamanan manusia dikarenakan oleh kecenderungan kepentingan *power and order* aktor non-negara (*rebel group*). Dan menjadi eksis sebagai aktor penyebab utama ancaman keamanan negara, baik militer maupun non-militer. Di samping juga merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap kematian manusia akibat konflik bersenjata yang terjadi semenjak tahun 1989 yang menjadi awal berakhirnya perang dingin. Hal tersebut ditunjukkan melalui tabel berikut di bawah ini:

Gambar 2 One-sided Fatalities by Tipe of Actor
 One-sided Fatalities by Type of Actor, 1989-2015



Sumber: Upsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se, 2016

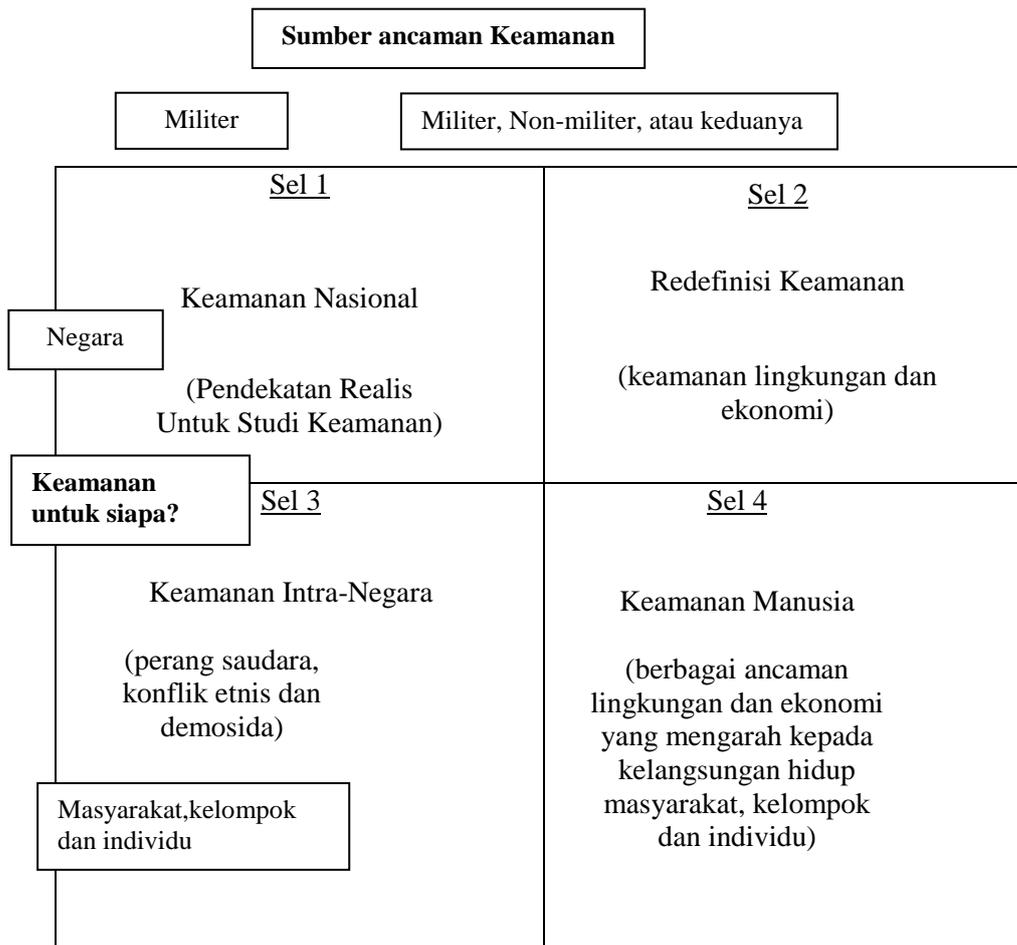
Merefleksikan penjelasan Gambar 1 dan Gambar 2. Heywood (2014:707) menjelaskan bahwa, keamanan sebagai isu paling dalam dan kekal dalam politik. Di jantungnya adalah pertanyaan: Bagaimanakah masyarakat dapat menjalani sebuah kehidupan yang layak dan berguna, yang bebas dari ancaman, intimidasi dan kekerasan? Penelitian tentang keamanan karenanya terkait dengan usaha untuk mencapai tatanan dan ketertiban; dan pembangunan perdamaian dan stabilitas relatif diantara individu-individu dan kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Masalah ini umumnya dianggap telah dipecahkan di lingkup domestik dengan adanya sebuah negara yang berdaulat, sebuah badan yang mampu memaksakan kehendaknya kepada semua kelompok dan lembaga yang ada di dalam wilayahnya. Akan tetapi, keamanan domestik memunculkan persoalan-persoalan penting, terutama tentang peran dari lembaga-lembaga dari negara koersif; yaitu polisi dan militer.

Dengan demikian berangkat dari argumentasi diatas, maka keamanan manusia sebenarnya menempatkan dirinya tidak dapat lepas dari fokus keamanan non-tradisional (nirmiliter) terkait beberapa isu di atas. Oleh karena itu, Alkira (2002:31) berusaha menjawab persoalan keamanan manusia terkait keamanan bagi negara atau bagi manusia itu sendiri (masyarakat, kelompok dan individu). Alkira mengacu kepada pemikiran Paris (2001:98) terkait keamanan bagi siapa (*security for whom*) dan sumber ancaman keamanan (*source of the security threat*) yang berhubungan dengan keamanan individu.

Paris menganalisis kedua pemikiran mendasar tersebut di atas kedalam diagram di bawah ini (Gambar 3) mengenai obyek dan sumber ancaman keamanan yang terdiri atas empat sel, yaitu: keamanan negara, redefinisi keamanan, keamanan intra-negara dan keamanan manusia.

Sejalan dengan Paris, maka Murtimer (2008:5) mengajukan keempat pertanyaan mendasar tentang konsep keamanan yang mencakup: *What is security?* (Apakah keamanan itu?), *Whose security are we talking about?* (Keamanan milik siapa?), *What counts as a security issue?* (Hal-hal apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai isu keamanan?) dan yang terakhir adalah: *How can security be achieved?* (Bagaimana keamanan dapat tercapai?).

Gambar 3 - Obyek dan Sumber Ancaman Keamanan



Sumber: Paris, 2001

Dengan demikian melalui keempat pertanyaan mendasar Murtimer tersebut di atas, maka terdapat dua kelompok pendekatan studi keamanan dalam hal ini. Yang pertama, yaitu *Toronto School* dan *Aberystwyth (Welsh) School* dikenal dengan apa yang disebut sebagai pendekatan studi keamanan kritis. *Toronto School* dipelopori oleh Keith Krause dan Mike Williams (1997). Kemudian *Aberystwyth (Welsh) School* diwakili oleh pemikiran Ken Booth (2007) dan Richard Wyn Jones (1997).

Hobden dan Jones (2005:241) menjelaskan bahwa studi keamanan kritis merupakan kombinasi pemikiran Gramsci dan teori kritis yang menekankan pada aspek-aspek perdamaian, dan oleh karena itu disebut juga dengan studi/pemikiran pertahanan alternatif pada awal 1980-an. Singkatnya, banyak pemikiran-pemikiran mengenai studi keamanan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat, yang demikian sebenarnya studi keamanan kritis mempersoalkan dominasi negara sebagai obyek natural analisis

keamanan dengan argumentasi bahwa negara adalah bagian dari persoalan keamanan itu sendiri, lebih dari sekedar penyedia keamanan. Para pendukung studi keamanan kritis menempatkan faktor manusia sebagai inti analisis mereka. Studi keamanan kritis menekankan kajian analisisnya melalui faktor manusia ini dalam rangka membantu dan meletakkan tujuan emansipasi, dimana melalui tujuan emansipasi ini maka keamanan dapat tercapai secara keseluruhan.

Pendekatan Studi Keamanan Kritis

Dalam tulisannya yang berjudul: *Critical Security Studies: A Schismatic History* (2013), David Murtimer menjelaskan perdebatan konsep keamanan diantara ketiga kelompok pemikiran tersebut sebagai “*follow the sign of the gourd*”, dimana studi keamanan kritis membutuhkan etos kritik yang membangun kritik tersebut secara langsung terhadap pengembangan studi keamanan kritis itu sendiri. Murtimer membagi ketiga kelompok pemikiran tersebut sebagai: *Toronto desire*, *Copenhagen distinctions* dan *Aberystwyth exclusions*.

Dari kedua pendekatan keamanan kritis tersebut di atas, maka pendekatan Keamanan Kritis *Aberystwyth/Welsh School* nampak menjadi *centre of interest focus* terkait *critical security approach leading-proponent* yang berusaha menjawab persoalan keamanan manusia. Dalam hal ini, manusia sebagai obyek referen keamanan yang bersifat otonom dari kajian ancaman keamanan negara.

Pada intinya, kelompok Welsh (*Aberystwyth School*) dipengaruhi oleh dominasi aliran pemikiran dari para teorikus beraliran pemikiran kritis (*Critical Theory*). *Welsh School* dipelopori oleh Ken Booth dan memiliki dua akar pemikiran, yaitu *radical interpretation* dan *critical theory*. Pemikiran Horkheimer, Adorno, ataupun Habermas, yang lebih dikenal dengan *Frankfurt School*, Gramsci, Marx dan para pemikir *critical theory* dalam kajian hubungan internasional sangat kuat mempengaruhi *Welsh School*. Fokus utama kelompok ini adalah apa yang menjadi makna kata “keamanan”. Mereka melihat keamanan tidak dalam ruang yang kosong. Makna keamanan tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda sosial yang dibawa oleh siapapun yang memberikan makna terhadap kata “keamanan” dan praktik politik yang tentu juga dipengaruhi oleh peta kekuatan yang ada (Wardoyo, 2015:91).

Seperti yang sudah terdeskripsikan di atas, maka terdapat tiga entitas persoalan ontologis yang diajukan oleh Booth tentang konsep keamanan dari sudut pandang teori kritis yang dijelaskan dalam Murtimer (2013:76) yaitu:

1. *What is real?* (Apakah yang nyata itu?). Fokus teori kritis adalah menyediakan sebuah jalan akan pemahaman ontologis dunia nyata sebagai sebuah praktek dari berbagai fakta sosial.
2. *What is knowledge?* (Apakah pengetahuan itu?). Teori kritis menyediakan makna pemikiran mengenai apakah pengetahuan itu, atau tentang epistemologi kehidupan sosial. Dengan demikian hal ini membawa langsung perhatian kita terhadap segala kepentingan utama akan setiap klaim utama pengetahuan, dan memandu kita untuk mempertanyakan kepemilikan siapa dari bentuk-bentuk pengetahuan tersebut yang secara khusus dipergunakan untuk apa, dan apakah kepemilikan akan segala bentuk pengetahuan tersebut membantu berbagai kepentingan yang ada dari setiap individu dari masing-masing kelompok yang ada.
3. *What is to be done?* (Apa yang harus dilakukan?). Teori kritis merupakan teori praksis, sebuah teori yang memandu kepada sebuah proses keterlibatan politis yang didesain dalam rangka mentransformasikan dunia.

Ketiga pernyataan ontologis yang diajukan oleh Booth dalam pengaruh *Critical Theory* di atas, yaitu: *What is real?*, *what is knowledge?* dan *what is to be done?* diterminologikan ke dalam tiga buah pernyataan ontologis dari karakteristik *Welsh School* yang membedakannya dari *Toronto School*, dan *Copenhagen School*. Ketiga pernyataan ontologis yang dimaksud adalah: (1). *Deepening Security (What is real?)*; (2). *Broadening Security (What is knowledge?)*; dan (3). *Extending Security (What is to be done?)*.

Ketiganya di atas merupakan sebuah *critical statement* dari *Welsh School* terhadap pendekatan keamanan tradisional yang mengabstraksikan isu-isu militer dalam konteks yang lebih luas dengan membuat serangkaian asumsi implisit tentang konteks isu-isu militer tersebut sebagai premis pendekatan realisme (Jones, 1999:102).

Deepening security dimaksudkan sebagai sebuah konseptualisasi keamanan yang tidak hanya menyediakan arti penting dari kritik terhadap studi keamanan tradisional, namun juga merupakan rekonstruksi pendekatan alternatif, lebih kritis lagi adalah basis orientasi konsep keamanan tersebut. Sedangkan pemikiran akan *broadening* dan

extending security menurut Jones dimaksudkan untuk membedakan keduanya keluar dari perdebatan isu-isu nonmiliter dan obyek referen keamanan sebagai wacana perdebatan konsep keamanan selama ini (Jones, 1999:103-104).

Broadening security sebagaimana yang dijelaskan oleh Booth merupakan fungsi dari *deepening security*. Ketika orang berbicara mengenai keamanan, atau bertindak atas nama keamanan, maka segala kata dan tindakan mereka yang tertanam akan mencerminkan konsepsi yang mendalam secara natural mengenai politik dunia. Hal ini mengartikan bahwa isu keamanan hanya dapat diperluas berdasarkan asumsi-asumsi pokok teori politik (Booth, 2013:65). Sedangkan *extending security* bagi Booth (2013:71) merupakan *restructuring security* yang berangkat dari keamanan negara (*state security*) sebagai obyek referen dalam perspektif realis, dan terutama *Copenhagen School*, maka teori keamanan kritis menjelaskan obyek referen keamanan yang berbeda. Tugasnya adalah menolak siapa dan apa sebagai struktur kategorial yang memprevilasi teori politik.

Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini, Booth kembali menekankan pentingnya konsep emansipasi sebagai tujuan utama keamanan melalui pemikirannya yang tertuang dalam bukunya, yaitu *Theory of World Security* (2007). Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi konseptual dari Emansipasi yang dibangun oleh Booth berangkat dari pemahaman bahwa: sebagai wacana politik, emansipasi berusaha mengamankan manusia dari berbagai macam tekanan yang membatasi tindakan dalam kehidupan manusia, yang kompatibel dengan kebebasan pilihan-pilihan lainnya.

Menurut Booth (1991:319) emansipasi adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan, yang mana emansipasi menghentikan kedua ancaman tersebut keluar dari yang seharusnya manusia dapat bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya. Perang dan ancaman terhadap perang adalah salah satu dari ikatan keterancaman tersebut, bersama-sama dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, penindasan politik dan selanjutnya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat struktur/hirarki yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri.

Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi keamanan masih cenderung didominasi pemikiran mengenai keamanan negara (*state security*) yang masih berputar pada ancaman-ancaman bersifat militer (perang) yang menjadi domain dari analisis kaum (neo) realis. Negara sebagai unit sentral keamanan nasional menjadi penjamin utama keamanan bagi warga negara yang didasarkan pada persepsi ancaman militer (*state centric*). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas dari segala bentuk ancaman dan penindasan nir-militer.

Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai *security and self: Reflections of a Fallen Realist* (1997:107). Booth mengingatkan bahwa apa yang paling penting dari kecenderungan perang yang bersifat paksaan (kekerasan) akan menghambat emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam kaitannya dengan mempelajari keamanan adalah tidak hanya fokus berkonsentrasi pada tujuan meminimalisir/mencegah perang saja. Menurunkan kemiskinan, tekanan politik dan lainnya juga merupakan faktor penting dalam hal ini. Menurut Burchill dan Linklater (1996:224), Keamanan yang oleh Booth didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman sangat berkaitan dengan emansipasi karena otonomi, dalam beberapa tahap tertentu, bergantung dari tidak adanya ancaman yang melumpuhkan. Keamanan adalah yang melindungi atau menjaga otonomi. Tidak ada otonomi tanpa keamanan; karena tanpa keamanan individu atau kelompok tidak akan aman dalam pencarian mereka akan kebebasan, karenanya Booth dengan tegas menyatakan bahwa keamanan dan emansipasi seperti dua sisi dari koin yang sama. Kekerasan, perang, kemiskinan, tekanan politik dan pendidikan yang rendah hanyalah beberapa dari keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan Booth, yang mengancam keberadaan individu dan kelompok, yang karenanya membahayakan kemampuan mereka untuk bertindak bebas. Keamanan berdampak menjauhkan ancaman terhadap kebebasan dan otonomi. Dengan pertimbangan inilah maka konsep emansipasi mutlak melibatkan keamanan.

Terkait pelibatan keamanan, maka konsep emansipasi yang memperkuat *broadening security* Booth menurut Albert dan Carlsson (2009:35) terkait dengan *absence of personal violence* dan *absence of structural violence*. Tujuan akhir konsep emansipasi keamanan adalah membebaskan manusia dari *personal violence* berupa

freedom from fear. Di samping itu juga membebaskan manusia dari *structural violence* yang berwujud *freedom from want* dan *empowerment Dignity*.

Pendekatan keamanan kritis tidak pernah secara eksplisit menjelaskan hubungan konsep emansipasi dengan keamanan manusia. Namun konsep emansipasi sebenarnya mengandung terminologi keamanan manusia. Mengacu kepada relevansi keempat kandungan konsep emansipasi Booth, maka emansipasi terhadap manusia sebenarnya ditujukan dalam rangka mencapai keamanan dari rasa takut atau kebebasan dari ancaman rasa takut karena perang (*absence of fear from war*), keamanan untuk menjalani keinginannya dan keamanan dalam memberdayakan kemampuannya. Keamanan berarti membebaskan manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya. Yang dapat diartikan sebagai penemuan kemanusiaan (*inventing of humanity*).

Terkait terminologi keamanan manusia, maka Alberth dan Carlsson (2009:23-24) mengkolaborasikannya dengan keamanan manusia melalui pendekatan *narrow human security* (keamanan manusia yang bermakna sempit) dan *broad human security* (keamanan manusia yang bermakna luas). Keamanan manusia yang bermakna sempit berkaitan dengan tindakan yang mencakup ketiadaan terhadap ancaman personal/individu (*personal violence*), dan selanjutnya mempengaruhi ketiadaan terhadap ancaman kekerasan struktural (*structural violence*). Kedua kriteria ancaman tersebut sebenarnya memenuhi kategori primer dan kriteria inklusi mengenai kepemilikan dari kekuatan emansipatoris. Baik ketiadaan akan ancaman terhadap kekerasan individu dan ketiadaan akan ancaman kekerasan struktural merupakan kekuatan utama konsep emansipasi. Makna luas dari keamanan manusia seharusnya konsisten dengan studi keamanan kritis. Oleh karena itu studi keamanan kritis harus dikaitkan dengan keamanan manusia dalam rangka pembuatan kebijakan.

Yang menarik adalah, di samping Alberth dan Carlsson, keamanan manusia dalam perspektif pendekatan keamanan kritis tidak dapat dipisahkan dari dualitas konseptualisasi keamanan yang melihat faktor manusia sebagai: *real factor of security's object referent*, yang berdiri bebas di luar: *the whole part of state-centric security*. Mengenai hal tersebut oleh Kerr (2013:111) dijelaskan melalui tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6 - Dualitas Konseptualisasi Keamanan

<i>Human-centric Security-the narrow school</i>	<i>State-centric Security</i>
<p><i>Referent object:</i></p> <p><i>People at risk of political violence</i></p>	<p><i>Referent Object:</i></p> <p><i>State and territory at risk of outside military interference or invasion</i></p>
<p><i>Threat/s:</i></p> <p><i>Organized Political violence: e.g.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Civil War (involving the government and rebel or communal groups)</i> <i>Non-state conflict (involving communal or rebel groups or warlords but not the government). One-sided violence (involving government forces or non-state armed groups against defenceless civilians)</i> 	<p><i>Threat/s:</i></p> <p><i>Political Violence from the military force of other state</i></p>
<p><i>Practical Means:</i></p> <p><i>Military and non-military:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Prevention: diplomacy; addressing the causes of conflict; international regimes for the countering small arms/light weapons trade and anti-personel land mines; deterrent measures (e.g. ICC, war-crimes tribunals)</i> <i>Reaction: diplomacy; mediation; humanitarian military intervention, etc.</i> <i>Rebuild: diplomacy; state and nation building; law and order through policing; judicia system; the broad school agenda.</i> <i>The means are based on an assumption that sovereignty is a responsibility not simply a right</i> 	<p><i>Practical Means:</i></p> <p><i>Military and non-military:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>The military power of the state</i> <i>Diplomacy. The means are based on an assumption that sovereignty is an inviolable right</i>
<p><i>Action:</i></p> <p><i>The State: outside states and depending on the situation, domestic governments</i></p> <p><i>Non-state: international, regional and domestic</i></p>	<p><i>Action:</i></p> <p><i>The government/state, the military forces of the state</i></p>

Sumber: Kerr, 2013

Relevansinya terhadap Perang Intra-negara (*Intra-State War*)

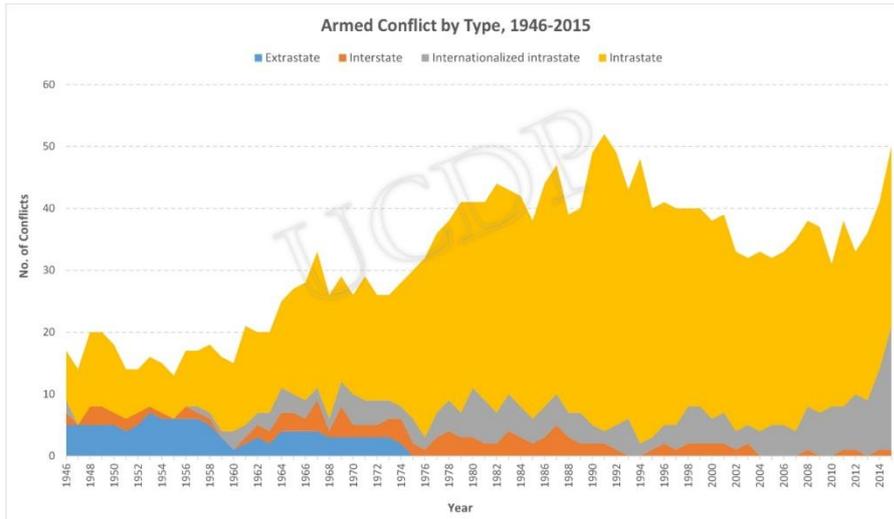
Holistikasi peninjauan ulang keamanan manusia dalam wacana pendekatan studi keamanan kritis secara khusus dapat dilihat dalam konteks perang intra-negara dewasa

ini. Hal ini begitu penting untuk dipahami dengan mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai dalam pigura MDGs yang sudah dipaparkan dalam paragraf pendahuluan di atas sebelumnya. Namun juga yang tidak kalah penting adalah pemahaman akan perang intra-negara yang memiliki dimensi internasional atau konflik internasional sebagai bagian dari perwujudan perang-perang baru (*new wars*). Perang-perang baru (*New Wars*) yang dimaksud berhubungan dengan perang intra-negara berupa konflik bersenjata/perang sipil. Baik perang sipil yang melibatkan aktor *combat-an* sipil melawan sipil, sipil melawan militer atau sebaliknya.

Perang-perang baru cenderung berupa perang sipil (perang saudara), daripada perang antar negara. Sekitar 95 persen konflik bersenjata sejak pertengahan 1990-an terjadi di dalam negara, bukan antar negara. Perang saudara telah menjadi umum di dunia bekas koloni (jajahan), dimana kolonialisme sering kali meninggalkan warisan persaingan etnis dan wilayah, keterbelakangan ekonomi dan kekuasaan negara yang lemah; dari sinilah muncul ‘negara-negara gagal’. Negara-negara ini lemah, dimana mereka gagal melewati ujian dasar kekuasaan negara; mereka tidak mampu memelihara ketertiban domestik dan keamanan personal, yang berarti kerusuhan sipil, dan bahkan perang sipil, menjadi rutin.

Meskipun demikian, ‘perang-perang baru’ sering kali memunculkan ancaman yang lebih luas dan hebat pada penduduk sipil daripada perang-perang antar negara gaya lama. Terakhir, perang-perang ‘baru’ sering kali lebih kejam dan mengerikan daripada perang-perang gaya lama, di mana aturan-aturan yang biasanya membatasi perang-perang konvensional antar negara telah disingkirkan. Praktik-praktik seperti penculikan, penyiksaan, pemerkosaan sistematis dan pembunuhan membabi-butakan yang berasal dari ranjau-ranjau darat, bom mobil dan serangan-serangan bunuh diri telah menjadi ciri yang lazim dari peperangan modern. Ini terkadang dijelaskan dalam sudut pandang implikasi-implikasi dari politik identitas militan, melalui mana musuh didefinisikan menurut keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok tertentu, bukan menurut peran mereka atau aksi-aksi mereka. Semua orang dari sebuah ras atau kebudayaan tertentu karenanya dapat didefinisikan sebagai ‘musuh’, di mana mereka dipandang secara melekat tidak berharga atau jahat, dan bahwa sasaran-sasaran militer dan sipil sama-sama absah (Heywood, 2014:733-736).

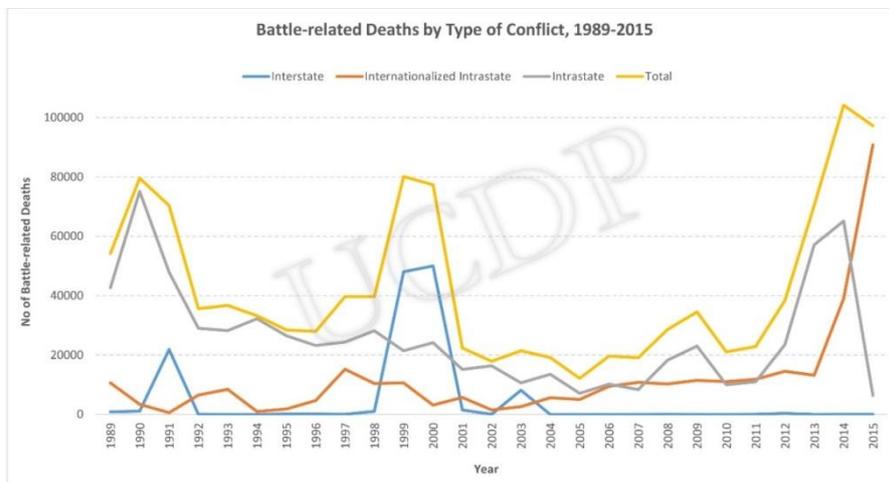
Tabel 4 – *Armed Conflict by Type*



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se, 2016

Tabel 4 menunjukkan apa yang dimaksud oleh Heywood dalam menjustifikasikan jumlah perang *intra-state* semenjak perang dunia kedua berakhir sampai dengan setidaknya tahun 2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Atau dengan kata lain, sumbangan terbesar penyebab kematian manusia diberikan dari dampak perang *intra-state* sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 5 berikut di bawah ini:

Tabel 5 – Battle-related Death by Type of Conflict



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se, 2016

Perang pada hakekatnya merupakan konflik terbuka. Pengertian konflik dalam pendekatan studi keamanan dapat dijelaskan melalui keterkaitannya dengan *intrastate conflict* yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata/perang sipil. Melalui *intrastate conflict* dapat dipahami bahwa perang sipil (*civil war*) yang terjadi sebenarnya bermula dari konflik politik yang terjadi di dalam negara yang bersangkutan. Dari perang sipil

ini kemudian merambah kepada intervensi negara lain terhadap eskalasi perang sipil di dalam negara yang dimaksud tersebut. Sehingga memunculkan eksekusi konflik berkelanjutan berdimensi eksternal. Konflik intrastate ini dipengaruhi oleh berbagai kepentingan para aktor yang terlibat dalam bingkai politik identitas berbasis etnis, agama maupun komunal yang menghambat terciptanya stabilitas keamanan yang berujung pada situasi dan kondisi perdamaian.

Perang bersenjata dalam hubungannya dengan konflik intra-negara mengacu kepada apa yang disebut sebagai konflik yang terjadi di dalam internal negara (*conflict within states*). Menurut Russet, dkk. (2010:208-209), konflik internal dalam suatu negara fokus kepada dua argumentasi mendasar. Yang pertama konflik tersebut bersifat destruktif dan berjalan lama, melibatkan keseluruhan kelompok masyarakat yang ada di negara tersebut, merusak infrastruktur sipil dan mengarahkan kondisi kepada terciptanya kemiskinan dan keterbelakangan. Konflik berikutnya adalah konflik antar negara (*conflict between states*). Meskipun memiliki efek yang sama dengan konflik dalam negeri, namun nampak kurang relevan dan sulit dipahami bahwa konflik antar negara sebenarnya juga dapat memicu konflik di dalam negara. Dalam sejarahnya, akan sulit untuk diselesaikan dan telah menciptakan perang internal (*internal war*) di dalam konflik internal negara tersebut. Hal ini akan berakibat negara tersebut menjadi negara gagal, dalam pengertian, pemerintahnya tidak mampu menyediakan tingkat keamanan yang dibutuhkan bagi warga negaranya, dan tidak bisa diharapkan sebagai negara yang berdaulat (*sovereign state*).

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terjadi konflik *intra-state* yang berujung kepada *internal war* di dalam negara tersebut yang menghambat terciptanya perdamaian. Pengertian *internal war* dapat dipahami sebagai konflik bersenjata (*armed conflict*). Dan tentunya melibatkan berbagai aktor politik atau kelompok masyarakat yang terlibat pada konflik internal dalam rangka perebutan kendali pemerintahan yang berdaulat dalam negara yang bersangkutan tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi obyektif dan kondisi subyektif (Wardoyo, 2015). Yang dimaksud dengan kondisi obyektif penyebab konflik antara lain adalah kepentingan nasional suatu negara, faktor teritorial, faktor kedaulatan, serta perebutan sumber daya ekonomi dan pembangunan. Kondisi obyektif yang menjadi penghambat dalam tercapainya perdamaian biasanya merupakan isu-isu yang berkenaan dengan kebijakan atau

kepentingan negara sebagai aktor dalam dunia internasional. Dengan asumsi bahwa setiap tindakan negara didasari oleh pertimbangan rasional maka faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik akibat tindakan negara dalam memenuhi kepentingannya dikatakan sebagai kondisi yang obyektif. Yang dimaksud dengan kondisi subyektif antara lain keinginan untuk memperoleh pengakuan atas suatu identitas, faktor etnisitas dan perlindungan atas kebudayaan, serta persoalan representasi politik. Jika kondisi obyektif menempatkan keutamaan negara maka kondisi subyektif lebih menjelaskan mengenai sebab-sebab konflik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau yang terjadi di level komunitas.

Kondisi obyektif dan subyektif yang menyebabkan konflik internal tersebut diatas, menurut Sheehan (2011:225) terkait dengan kemunculan konflik internal. Dalam hal ini Sheehan menjelaskan bahwa penyebab konflik internal sering dikaitkan dengan faktor kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Berbagai variasi persoalan keamanan seperti faktor kemiskinan, stabilitas, pembangunan dan perdamaian seringkali berhubungan dengan penyebab ketidakamanan (*insecurity*).

Menghubungkan keamanan manusia dalam wacana pendekatan studi keamanan kritis yang merelevansikan perang-perang baru (*new wars*) yang cenderung berupa perang *intra-state* memberikan nuansa tersendiri bagi pemahaman ontologis dan epistemologis studi keamanan dalam politik keamanan global. Perhatian terhadap *human security* muncul sejak perang dingin dan diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok dan individu tertentu. Menguatnya gagasan dan upaya *human security* yang merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini., mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran HAM dan sebagainya (Ikbar, 2014:205).

Pendekatan studi keamanan kritis sebenarnya menekankan pada esensi konsep emansipasi yang membebaskan manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai makhluk-makhluk individu (*individuals*) maupun makhluk sosial/kelompok (*groups*) dari berbagai tekanan fisiknya dan kemanusiaannya. Jadi, perang *intra-state*, maupun ancaman perang tersebut adalah aplikasi dari tekanan-tekanan tersebut. Suatu ragam tekanan yang menghasilkan kemiskinan, pendidikan yang rendah, politik opresif dan

sebagainya. Artinya dampak yang diberikan perang tersebut mencakup berbagai tekanan struktural karena bersifat sistemis dari turbulensi lingkaran wilayah politik, lingkungan, sosial, ekonomi, militer dan budaya. Hal tersebut yang menjadi jawaban ontologis mengenai pertanyaan apakah keamanan itu (*what is security?*). Dengan demikian obyek keamanan bisa mereferensi kepemilikan dari subyek siapa saja (aktor negara maupun aktor non-negara) yang merasa terancam keamanannya secara sistemik dan struktural dari keseluruhan turbulensi wilayah tersebut di atas. Sehingga isu-isu keamanan dimana manusia menjadi pertimbangan utama isu keamanannya. Dan tentunya keamanan manusia ini menjadi pintu masuk terciptanya: *freeing people to any constrain and oppression of their life, both as their individully and groups.*

Tujuan, perilaku dan jalannya perang intra-negara ini secara signifikan berbeda dari perang antar negara (*inter-state war*) yang mendominasi tahun-tahun terakhir perang dingin. Perang intra-negara (*intra-state*) menjadi tantangan bagi kebijaksanaan konvensional tentang perang jenis ini sangat bervariasi dalam hal penyebab dan peaksanaannya. Sebagian dilancarkan oleh pemberontak yang ingin menguasai pemerintahan, mencari harta rampasan dan wilayah; yang lain dilancarkan oleh etnis minoritas yang menginginkan kemerdekaan; yang lain lagi, seperti perang saudara di Rwanda, tampaknya tanpa tujuan materi kecuali pembunuhan massal. Dalam hal pelaksanaannya, perang intra-negara cenderung berupa perang non-konvensional yang mengandalkan perang gerilya. Sangat berbeda dari perang antar negara. Selanjutnya, perang saudara dapat bersifat etnis maupun non-etnis. Perang saudara non-etnis melibatkan sengketa atas kontrol negara, yaitu institusi-institusi dan wilayahnya. Perang jenis ini berupa pertarungan militer untuk merebut kekuasaan politik. Perang saudara etnis, sebaliknya, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memandang diri mereka sebagai komunitas etnis, bangsa atau agama yang berbeda. Identitas dan tujuan mereka tidak sesuai dengan identitas dan tujuan orang-orang yang menguasai negara. Memang, mereka menginginkan lebih dari kontrol negara, mereka ingin mendefinisikan kembali atau membagi-bagi negara (Mansbach & Rafferty, 2012:386-387).

Simpulan

Dalam isu keamanan, kepentingan para aktor dalam *power and order* merefleksikan kemampuan *influence* dari para aktor tersebut terhadap obyek keamanan dalam berbagai entitas komunitas kehidupan: baik negara, organisasi internasional, kelompok negara, komunitas politik, komunitas ekonomi maupun militer. Kemampuan *influence* tersebut akan berinteraksi dalam wahana politik keamanan, baik internasional maupun global. Pola interaksinya dalam politik internasional maupun global apakah bersifat kompetisi, bersekutu maupun berlawanan pada hakekatnya merupakan hasil kemampuan para aktor politik tersebut sebagai bentuk eksploitasi pengendalian isu-isu keamanan atas *power and order* yang dimilikinya. Dalam konteks ini pergeseran studi keamanan dari yang bersifat tradisional (militer) menjadi non-tradisional (non-militer) menemukan momentum fenomena konseptual dengan apa yang dinamakan sebagai perang-perang baru (*new wars*).

Titik tolak dari pergeseran pendekatan studi keamanan berawal dari *Copenhagen School* (Buzan, Weaver dan De Wilde) yang menampilkan konsep sekuritisasi dengan keamanan sektoral-nya. Dalam pandangan *Copenhagen School*, aktor dalam isu keamanan memberikan konstruksi persoalan obyek keamanan menjadi terpolitisasi ke dalam beberapa sektor keamanan. Sektor-sektor keamanan ini mencakup militer, politik, ekonomi, lingkungan, sosial dan individu. Dengan demikian subyek keamanan yang dimaksud dalam hal ini masih berada dalam unit analisis tetap, yaitu negara terhadap obyek-obyek keamanan yang tersekuritisasi menjadi beberapa sektor tersebut di atas. Hal tersebut semakin menguatkan argumentasi Koldor terkait perang-perang baru (*new wars*) yang dimaksud. Dalam hal ini sekuritisasi sektor-sektor keamanan tetap melibatkan manusia sebagai obyek referen keamanan yang merupakan subordinasi negara sebagai subyek utama penyedia sektor-sektor utama keamanan tersebut dalam menjamin kebebasan manusia dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter.

Jadi dengan demikian, perang-perang baru sebenarnya mengejawantahkan suatu refleksi atas peran manusia sebagai subyek keamanan dan obyek keamanan yang menggeser peran sentral negara sebagai aktor utama penanggung jawab utama persoalan ancaman terhadap negara yang bersifat militeristik. Sebagai subyek keamanan dikarenakan manusia meng-konotasikan dirinya sebagai aktor kelompok atau grup, yang dalam hal ini lebih memainkan peranannya sebagai organisasi non-militer yang menebarkan ancaman-ancaman keamanan berupa perang-perang sipil atau perang

internal (*internal war*). Dampak yang diberikan bisa beragam dalam tingkatannya secara politik, ekonomi, militer, lingkungan dan individu secara struktural dan sistemik. Obyek ancaman lebih ditujukan kepada manusia sebagai aktor non-combatan dalam wilayah suatu negara yang dipicu oleh variasi latar belakang konflik bersenjata seperti teritorial, nilai-nilai dan ideologi (*values and ideologies*), ras dan etnik (*racial and ethnic hostilities*), mempertahankan dari serangan (*defence against hostile attacks*), revolusi dan nasionalisme. Sebagai bentuk perang baru (*new wars*) maka lazim disebut sebagai perang *intra-state*. Secara implisit, karakteristik perang *intra-state* dapat ditemukan pada perang sipil bukan perang antar negara, menonjolnya isu-isu identitas komunal, berupa perang simetris yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang tidak sebanding, perbedaan sipil/militer menjadi kabur, merupakan kelompok barbaris yang tidak seperti kelompok pasukan reguler dalam perang-perang lama.

Pada akhirnya pendekatan studi keamanan kritis yang dipelopori oleh *Aberystwyth/Wales School* (Booth dan Wyn Jones) di samping *Toronto School* (Krausse dan Williams) memberikan kepastian akan kekuatan konsep keamanan yang bebas dari distingsi keamanan militer maupun nirmiliter. Konsep keamanan tersebut dikenal sebagai konsep emansipasi yang hadir untuk menunjukkan suatu validitas definisi mengenai apakah ancaman keamanan yang sebenarnya (*true security*). Dari definisi konsep emansipasi maka membebaskan manusia dari segala macam tekanan dan penindasan, baik yang bersifat *personal violence* maupun *structural violence* menjadi tujuan utama dari kelompok studi keamanan kritis tersebut. Pendekatan studi keamanan kritis menekankan pada kebebasan epistemis cara pandang manusia sebagai obyek referensi keamanan. Dan kemudian menolak dikotomi subyek dan obyek pendekatan studi keamanan dalam hegemoni previlasi politik keamanan realisme.

Daftar Pustaka

- Alberth, J., & Carlsson, H. (2009). *Critical Security Studies, Human Security and Peace*. Diambil 2 Mei 2014 dari www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/DuppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf
- Alkire, S. (2003). *A Conceptual Framework For Human Security*. Oxford: University of Oxford.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, No.17 (4): 313 – 216.

- Booth, K. (1997). Security and Self: Reflections of a Fallen Realist. *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Krause, K., & Williams, M.C. (editor). London: University College London.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.
- Booth, K. (2013). Deepening, Broadening, Reconstructing. *Critical Security Studies: Critical Concepts In Military, Strategic and Security Studies*. Williams, N.V. (editor). New York: Routledge.
- Burchill, S., & Linklater, A. (1996). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Terjemahan: Sobirin, M. Bandung: Nusa Media.
- Buzan, B., & Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Terjemahan: Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hirst, P. (2004). *Perang dan Kekuatan Di Abad Ke-21*. Terjemahan: Setia Bangun. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hobden and Jones. (2001). Critical Theory. *The Globalization of World Politics-An Introduction to International Relations*. Baylis, J., & Smith, S. (editor). New York: Oxford University Press.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Jones, R. W. (1999). *Security, Strategy and Critical Theory*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Kaldor, M. (2007). *New Wars and Human Security*. Diambil 22 April 2017 dari https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1391450911d11Kaldor.pdf
- Kerr, P. (2013). Human Security. *Contemporary Security Studies*. Collins, A. (editor). United Kingdom: Oxford University Press.
- Krause, K., & Williams, M. C. (1997). *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. London: University College London.
- Mansbach, R. W., & Rafferty, K. L. (2010). *Pengantar Politik Global*. Terjemahan: Amat Asnawi. Bandung: Nusa Media.
- Murtimer, D. (2013). Critical Security Studies: A Systematic History. *Contemporary Security Studies*. Collins, A. (editor.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?. *International Security*, No. 26 (2): 87 – 102.
- Russet, B., & Starr, H., & Kinsella, D. (2010). *World Politic: Menu for Choice*. Boston: Wadsworth.
- Sheehan, M. (2011). The Changing Character of War. *The Globalization of World Politics-An Introduction to International Relations*. Baylis, J., & and Smith, S. (editor). New York: Oxford University Press.
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media.